



Kebijakan Pengawasan terhadap Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dialog Interaktif Pimpinan APIP Daerah
Jakarta, 15 Juli 2020



Outline

01 Pandemi COVID-19: Pengaruh dan Penanganannya

02 Kebijakan Pengawasan terhadap Program Penanganan Covid-19 dan Program PEN

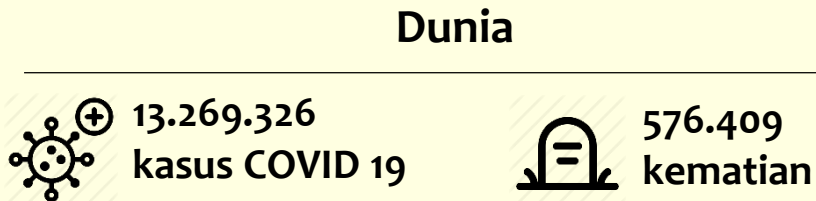
1. Pengawasan pada Tiap Tahapan Program
2. Strategi Pengawasan atas Program Penanganan Covid-19
3. Strategi Pengawasan atas Program PEN
4. Framework Umum Pengawasan atas Program Penanganan Dampak Covid-19 dan Program PEN



Pandemi COVID-19: Pengaruh dan Penangannya

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan & Perekonomian Indonesia

KESEHATAN



<https://www.worldometers.info/coronavirus/> per 14 Juli 2020

EKONOMI



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020

Sebelum COVID-19	5,3% (APBN 2020)
------------------	----------------------------

Sesudah COVID-19	-0,4% Skenario Sangat Berat	2,3% Skenario Berat
------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Potensi Dampak Sosial (juta orang)

Kemiskinan	+4,86	+1,89
------------	--------------	--------------

Pengangguran	+5,23 Skenario Sangat Berat	+2,92 Skenario Berat
--------------	---------------------------------------	--------------------------------

Mitigasi dampak pada kesejahteraan masyarakat → Kebijakan **EXTRAORDINARY** → Menjaga agar tidak menuju skenario sangat berat

Pendapatan dan hibah	Rp664,32 T	-9,02% (yoy)
Belanja	Rp 843,9 T	-1,4% (yoy)
Defisit	Rp179,62 T	1,07% PDB
Keseimbangan Primer	(Rp33,92 T)	

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15459/apbn-kita-juni-2020.pdf>



BIAYA PENANGANAN COVID-19 (Rp695,26T sesuai Perpres 72/2020)

Untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, dan Pemda

Kesehatan



Rp87,55 T

- Belanja Penanganan Covid-19
- Insentif Tenaga Medis
- Santunan Kematian
- Bantuan Iuran JKN
- Gugus Tugas Covid-19
- Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan

Perlindungan Sosial



Rp203,96T

- PKH
- Sembako
- Bansos
- Pra Kerja
- Diskon Listrik
- Logistik / Pangan / Sembako
- BLT Dana Desa

Sektoral K/L & Pemda



Rp106,11 T

- Program Padat Karya K/L
- Insentif Perumahan
- Pariwisata
- DID Pemulihan Ekonomi
- Cadangan DAK Fisik
- Fasilitas Pinjaman Daerah
- Cadangan Perluasan

UMKM



Rp123,46 T

- Subsidi bunga
- Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya
- Belanja IJP
- Penjaminan untuk Modal Kerja
- PPh Final UMKM DTP
- Pembiayaan Investasi Koperasi LPDB KUMKM

Pembiayaan Korporasi



Rp53,57 T

- Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya
- PMN
- Investasi untuk Modal Kerja

Insentif Usaha



Rp120,61T

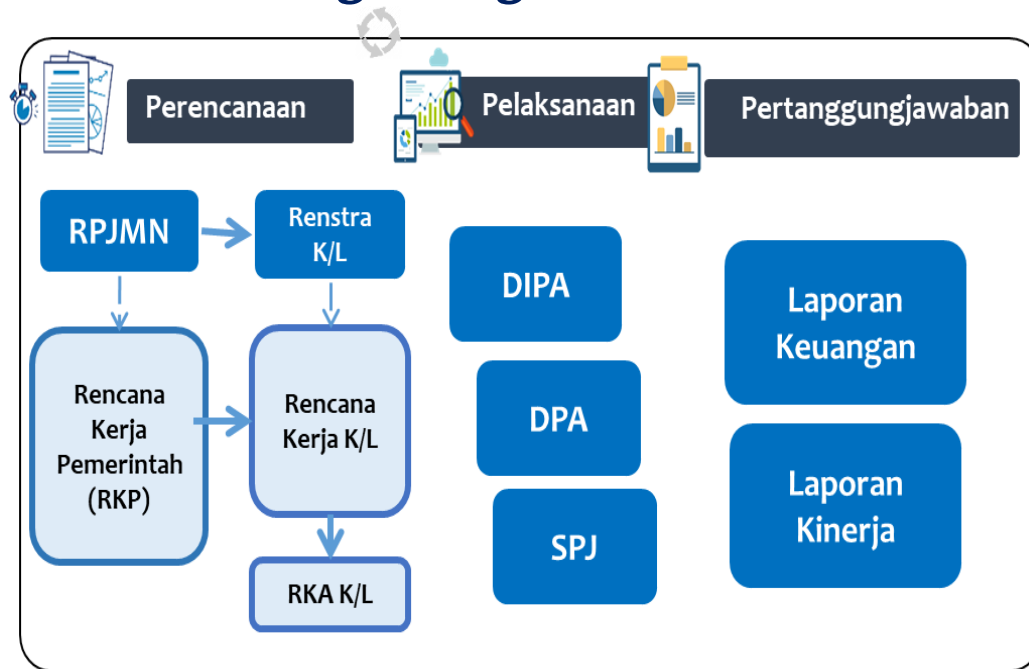
- PPh 21 DTP
- Pembebasan PPh 22 Impor
- Pengurangan Angsuran PPh 25
- Pengembalian Pendahuluan PPN
- Penurunan Tarif PPh Badan
- Stimulus Lainnya



Sinergi Pengawasan terhadap Program Penanganan Covid-19 dan Program PEN

Pengawasan pada Tiap Tahapan Program

Siklus Keuangan Negara



PERENCANAAN & PENGANGGARAN

TUJUAN

Memastikan target pergeseran anggaran terpenuhi

KEGIATAN PENGAWASAN

Reviu refocusing anggaran



PERTANGGUNGJAWABAN

TUJUAN

Memastikan pertanggungjawaban didukung dg bukti yg memadai & dilaporkan secara benar

KEGIATAN PENGAWASAN

Reviu data dukung, pencatatan, dan pelaporan



PELAKSANAAN PROGRAM

TUJUAN

Memastikan penyaluran 4T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas)

KEGIATAN PENGAWASAN

- Monev realisasi
- Audit kriteria dan database penerima
- Audit penyaluran/kinerja program



KEGIATAN PENGAWASAN

Consulting/Pendampingan

Renstra dan Renja K/L/D selaras Prioritas Nasional

Reviu RKA K/L/D

Alokasi sesuai prioritas

Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan

dan Pengawasan Lainnya

3E dan Ketaatan

Investigasi Kasus Fraud

Reviu Laporan Keuangan

Kesesuaian dengan standar

Koordinasi dengan APIP K/L/D, BPKP, BPK dan APH

Strategi Pengawasan atas Program Penanganan Covid-19

KEP 29/2020 Pedoman Pengawasan atas Revisi Anggaran dan Penggunaan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya 999.08

Persiapan

- Kelengkapan dokumen
- Koordinasi

Pelaksanaan

- Penelaahan dokumen
- Kesesuaian substansi materi revisi anggaran
- Pembahasan *online*

Pelaporan



Hasil Reviu

KEP 30/2020 Pedoman PBJ Penanganan Covid-19

- Perencanaan
- Pemilihan Penyedia
- Pelaksanaan Kontrak

Pengawasan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa (*Probit Audit*)

Strategi Pengawasan Intern

- Pemanfaatan TIK secara maksimal
- Komunikasi hasil pengawasan melalui surel/video dokumentasi

PMK 204/2015 Pengawasan Belanja BUN

Pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA BUN dan Koordinasi dg APIP K/L/D

Risiko dan Pengendalian terkait Belanja Penanganan Covid-19



RISIKO

DATA PENERIMA

- data fiktif dan data kurang *update*
- Aplikasi belum mengakomodasi kebutuhan penyaluran
- Kebijakan teknis masih disusun

PROSES PENYALURAN

- Duplikasi/tidak tercantumnya penerima bantuan
- Keterlambatan Penyaluran
- Risiko *fraud* dalam penyaluran
- Ketidaksiapan pihak ketiga dalam memberikan jasa

PERTANGGUNGJAWABAN

- Dokumen dan Bukti pendukung kurang memadai
- Salah pencatatan dan penyajian
- Opini LKBUN/LKPP tidak WTP

EKSPEKTASI MASYARAKAT

Realita di lapangan berbeda jauh dengan harapan masyarakat



PENGENDALIAN

- *Updating* database dan penyesuaian aplikasi
- Verifikasi berjenjang dari pemma/pihak yang berwenang
- Monitoring penyaluran melalui OMSPAN
- Pembukaan layanan informasi & pengaduan

Strategi Pengawasan atas Program PEN (PMK Nomor 75/PMK.09/2020)

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

- Penyertaan Modal Negara
- Penempatan Dana
- Investasi Pemerintah
- Penjaminan; dan/atau
- Kebijakan PEN melalui belanja negara sesuai ketentuan Perundang-undangan

PMK PEDOMAN PENGAWASAN

- **Pedoman Pengawasan Intern**, mulai dari Perencanaan s.d. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut
- **Penjagaan Kualitas**

POLA KOORDINASI PENGAWASAN APIP

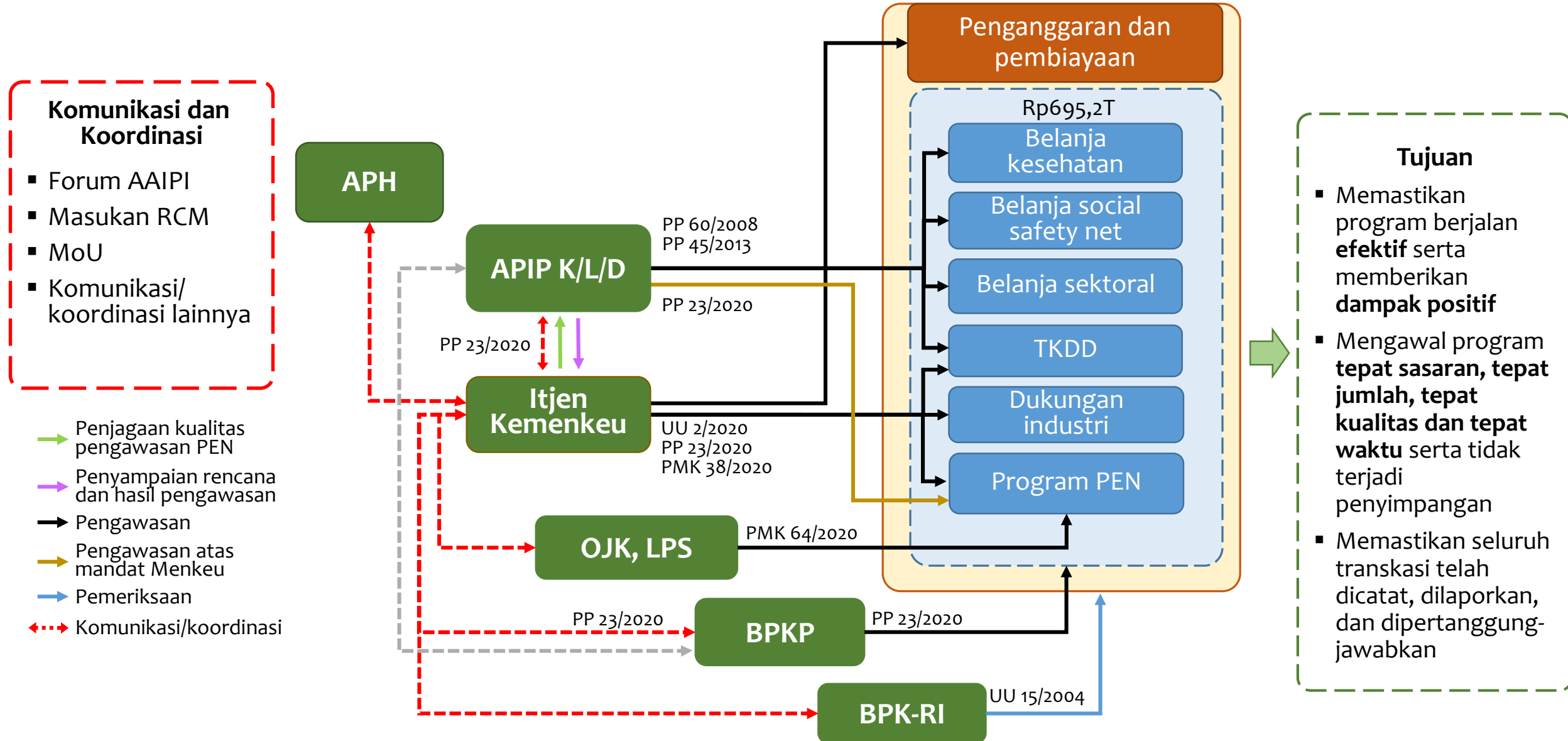
1. **Koordinasi dan Sinergi Pengawasan** dalam: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan
2. **Penjaminan Kualitas** oleh Itjen Kemenkeu



Fokus Risiko

- Perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan
- Realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas
- Pertanggungjawaban tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang memadai
- Menurunnya kepuasan masyarakat, serta menurunnya reputasi pemerintah

Framework Umum Pengawasan atas Program Penanganan Dampak Covid-19 dan Program PEN



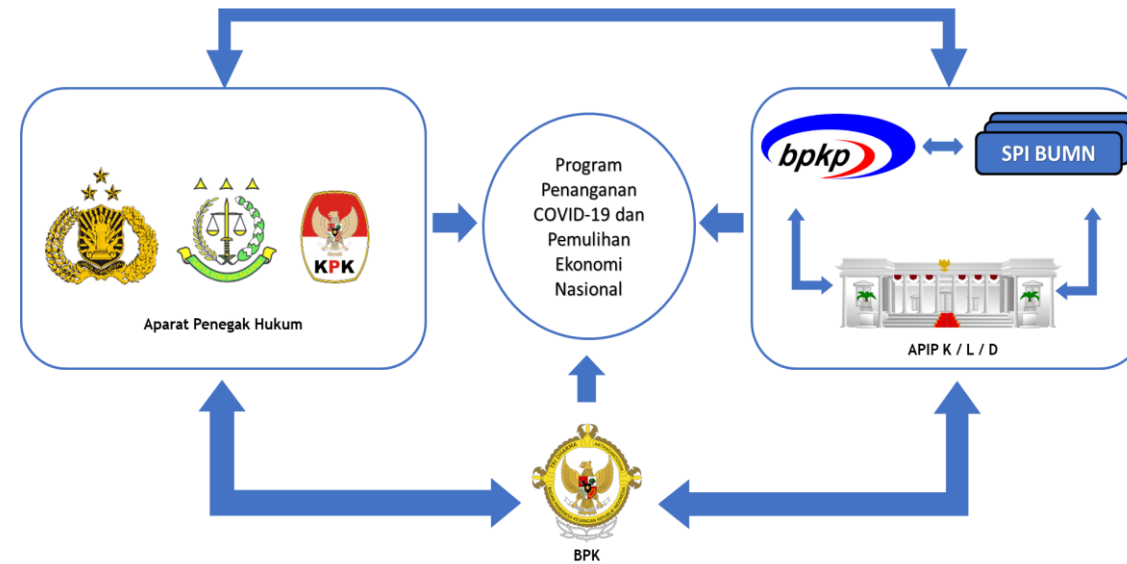
Sinergi Pengawasan Dengan APIP K/L/D, BPKP, BPK dan APH

Pendekatan pengawasan adalah pencegahan dan penindakan dengan mengedepankan pencegahan

SINERGI dg APH

(POLRI, KEJAGUNG, dan KPK)

- Koordinasi pencegahan dan deteksi penyimpangan – mengedepankan peran APIP (MOU)
- Memperhatikan risiko reputasi pemerintah (menghindari kegaduhan).
- Sinergi indikasi *fraud*/penyimpangan:
 - APIP melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh APH
 - Komunikasi informasi oleh APH ke APIP atas indikasi *fraud*



SINERGI dg BPK

- Pendampingan pengumpulan data dan pelaksanaan pemeriksaan
- Penyediaan data/informasi hasil pengawasan Program
- Komunikasi Strategi dan Rencana Aksi Tindak Lanjut rekomendasi BPK atas perbaikan Program

SINERGI dg APIP K/L/D dan BPKP

- Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan
- Penyusunan pedoman
- Pengembangan RCM
- Reviu RKA R/L – refocusing anggaran dan pelaksanaan UU 2/2020
- Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya atas Program Penanganan COVID-19 dan PEN
- Pertukaran data/informasi hasil pengawasan
- Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan Program Penanganan COVID-19 dan PEN
- Kompilasi Hasil Pengawasan APIP secara nasional

Terima Kasih

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai 4-13
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710
Telp. (021) 3865430